

Patriarki birokratik: Identitas perempuan dalam praktik penyebutan nama dan jabatan suami di organisasi militer

Bureaucratic patriarchy: Women's identities in the practice of naming and naming husbands in military organizations

Yudhy Widya Kusumo¹, Eka Anisa Sari^{2*} & Siti Chotijah³

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

³Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta, Indonesia

**Penulis Korespondensi*

Author's email:

²eka.sari@comm.uad.ac.id

Keywords:

Critical discourse analysis,
gender communication,
identity construction,
military wives organization,
Sara Mills

Kata kunci:

Analisis wacana kritis,
konstruksi identitas,
organisasi istri militer, Sara
Mills

Abstract: This study aims to explore how communication practices, particularly the mention of husbands' names and titles, shape women's identities within military wives' organizations in Indonesia. Within this organizational structure, women's personal identities are often reduced to secondary identities related to their husbands' positions. Using Sara Mills' critical discourse analysis, this study examines the roles of subject and object, as well as the representation of women in organizational discourse. Data were collected through in-depth interviews with soldiers' wives across ranks and through observations of symbolic interactions on social media. The results show that the practice of mentioning husbands' names and titles functions as a form of symbolic violence that fragments women's authentic identities. This phenomenon creates a condition in which women become "integrated wives," with their personal agency absorbed by the institution's image. In the digital era, this construction is further reinforced through the disciplining of women's bodies and behaviors on social media to maintain the authority of their husbands' positions. This study concludes that military wives' organizations remain spaces that maintain bureaucratic patriarchy, which positions women as mirrors of male power.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana praktik komunikasi, terutama penyebutan nama dan jabatan suami, membentuk identitas perempuan dalam organisasi istri militer di Indonesia. Dalam struktur organisasi ini, identitas pribadi perempuan sering kali tereduksi menjadi identitas sekunder yang terkait dengan posisi suami. Dengan menggunakan pendekatan kritis dan Analisis Wacana Kritis berdasarkan model Sara Mills, penelitian ini berfokus pada peran subjek dan objek serta representasi perempuan dalam wacana organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan istri prajurit dari berbagai tingkat kepangkatan dan observasi terhadap interaksi simbolik di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyebutan nama dan jabatan suami berfungsi sebagai bentuk kekerasan simbolik yang memecah identitas asli perempuan. Fenomena ini menciptakan kondisi di mana perempuan menjadi "istri yang terintegrasi," dengan agensi pribadi mereka diserap oleh citra institusi. Di era digital, konstruksi ini semakin diperkuat melalui pendisiplinan tubuh dan perilaku perempuan di media sosial untuk menjaga wibawa jabatan suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi istri militer masih menjadi ruang yang mempertahankan patriarki birokratik yang menempatkan perempuan sebagai cermin dari kekuasaan laki-laki.

PENDAHULUAN

Organisasi istri militer di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk identitas perempuan dalam konteks peran mereka sebagai pasangan prajurit. Meskipun tujuan utama organisasi ini adalah memberikan dukungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan para istri prajurit, tetapi pada kenyataannya banyak praktik dalam organisasi ini yang mengarah pada pembentukan identitas perempuan yang erat terkait dengan posisi suami mereka. Utamanya, melalui penyebutan nama dan jabatan suami. Dalam hal ini, identitas pribadi perempuan sering kali direduksi menjadi identitas sekunder yang hanya mencerminkan posisi sosial suami dalam hierarki militer.

Dalam perspektif kritis, penyebutan identitas semacam menjadi masalah praktik karena bukan sekadar ritual sosial, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan simbolik yang mengurangi kemampuan perempuan untuk menunjukkan identitas yang lebih kompleks dan mandiri (Turner & Lin, 2024; Zembylas, 2020). Beberapa fenomena terkini memperkuat struktur patriarki dan membatasi identitas perempuan. Pertama, kontrol sosial terhadap perempuan di media sosial yang semakin meningkat. Media sosial lebih dari sekadar ruang untuk berbagi informasi, sebaliknya berfungsi untuk membentuk citra ideal istri militer. Citra ideal ini sering kali sangat terikat pada status tinggi suami. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perempuan hanya dianggap sebagai refleksi dari suami mereka, bukan sebagai individu dengan identitas sendiri (Lewis, 2020; Svensson, 2019).

Kedua, terdapat fenomena budaya patriarki yang terus dipertahankan melalui media dan iklan yang berhubungan dengan militer. Beberapa iklan dan postingan di media sosial menggambarkan istri prajurit sebagai simbol kesetiaan dan kesuksesan

suami, tanpa memperhatikan peran dan kontribusi perempuan secara individu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perempuan didorong untuk selalu tampil sebagai bagian dari keberhasilan suami, yang mengurangi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan identitas pribadi mereka (Kim & Angouri, 2023; Rachmawati et al., 2022).

Ketiga, ada isu terkait penggunaan wacana dalam struktur organisasi yang semakin memperkuat hierarki kekuasaan yang ada. Banyak perempuan yang terjebak dalam konstruksi sosial yang membatasi peran mereka di luar status suami. Dalam banyak organisasi, termasuk organisasi istri militer, perempuan tidak jarang dipaksa untuk mendefinisikan diri mereka hanya berdasarkan peran mereka sebagai pasangan suami, tanpa memberi ruang untuk potensi atau aspirasi pribadi mereka (Jon, 2020).

Keempat, meskipun ada upaya untuk memberikan perempuan ruang untuk beraktivitas di luar rumah, kenyataannya program pemberdayaan perempuan dalam organisasi istri militer sering kali terbatas pada peran domestik yang masih sangat dipengaruhi oleh norma gender tradisional. Banyak perempuan dalam organisasi ini merasa terbatas oleh norma yang mengharuskan mereka tetap berada dalam ranah domestik dan mengabdikan pada keluarga dan suami, tanpa diberi kesempatan untuk berkembang di luar peran tersebut (Ives & Rana, 2018).

Kelima, fragmentasi identitas perempuan dalam lingkungan organisasi yang kaku sering terjadi karena adanya tekanan dari lingkungan sekitar yang mendorong perempuan untuk mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh norma sosial dan institusi. Ini memperlihatkan bahwa meskipun perempuan diberi ruang dalam organisasi istri militer, banyak yang merasa terasing karena harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan citra

yang diinginkan oleh masyarakat dan institusi (Dilley, 2009).

Menurut Mills (2003), praktik penyebutan nama dan jabatan suami adalah contoh bagaimana wacana membentuk dan mendefinisikan peran gender dalam masyarakat. Dalam hal ini, istri prajurit sering kali dilihat melalui lensa suami mereka, yang akhirnya mengaburkan atau bahkan menghapuskan identitas mereka sendiri. Hal ini mencerminkan kekuatan struktur patriarki, di mana perempuan dianggap tidak terpisahkan dari peran suami mereka. Sementara itu, posisi perempuan sebagai istri militer sering kali dianggap sebagai simbol wibawa (*prestise*) bagi suami, yang menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih jauh bagaimana fenomena-fenomena ini berperan dalam membentuk identitas perempuan dalam organisasi istri militer dan bagaimana praktik wacana ini memperkuat posisi perempuan dalam kerangka patriarki yang lebih besar (Yusanto et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis* atau *CDA*) yang dikembangkan oleh Sara Mills. Penelitian memfokuskan pada hubungan kekuasaan yang tercermin dalam wacana sosial dan komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menggali bagaimana bahasa, praktik komunikasi, dan representasi gender dalam organisasi ini membentuk identitas perempuan dalam konteks yang lebih luas.

CDA juga membantu untuk memahami bagaimana struktur sosial yang lebih besar, seperti institusi militer, dapat memengaruhi dan bahkan membatasi peran perempuan, baik dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam organisasi yang mereka ikuti.

Penelitian mengenai konstruksi identitas perempuan dalam konteks

organisasi dan institusi negara telah berkembang secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Sejumlah studi menunjukkan bahwa identitas perempuan sering kali dibentuk melalui relasi kuasa yang bersifat struktural dan diskursif, terutama dalam lingkungan yang hierarkis dan patriarkal (Hyunanda et al., 2021; Kim & Angouri, 2023; Tanjung et al., 2025). Dalam konteks komunikasi organisasi, bahasa dan praktik representasi memainkan peran penting dalam mereproduksi ketimpangan gender melalui mekanisme simbolik yang halus (Rachmawati et al., 2022; Oktapiyani & Hamdani, 2025).

Perkembangan media sosial turut memperluas ruang sekaligus batasan bagi perempuan dalam membangun identitas diri. Studi menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga arena kontrol sosial yang memperkuat norma patriarkal melalui pengawasan dan standar representasi tertentu (Marzuki et al., 2025; Prihantini et al., 2024; Purnama et al., 2025). Dalam konteks organisasi perempuan berbasis negara, seperti Bhayangkari dan Dharma Wanita, penelitian sebelumnya juga menyoroti bagaimana identitas perempuan cenderung dilekatkan pada posisi suami dalam struktur birokrasi (Nugroho & Ahmar, 2022; Jakimow, 2018). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek struktural dan kebijakan, serta belum banyak mengkaji praktik komunikasi sehari-hari sebagai mekanisme produksi makna dan relasi kuasa. Secara khusus, kajian mengenai praktik penyebutan nama dan jabatan suami sebagai bentuk konstruksi identitas perempuan dalam organisasi istri militer masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji praktik diskursif pada level mikro sebagai bagian dari reproduksi

patriarki dalam organisasi. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Sara Mills, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi posisi subordinasi perempuan, tetapi juga mengungkap mekanisme linguistik dan representasional yang secara halus mereproduksi relasi kuasa dalam organisasi istri militer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis, khususnya model Sara Mills dengan memperluas penggunaannya ke dalam konteks organisasi istri militer di Indonesia.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya kajian komunikasi gender dengan mengintegrasikan dimensi digital sebagai ruang baru dalam konstruksi identitas perempuan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan organisasi yang lebih sensitif gender, khususnya dalam mendorong penggunaan praktik komunikasi yang mengakui identitas personal perempuan, serta dalam merumuskan pedoman yang lebih adil terkait representasi perempuan di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga pada praktik komunikasi organisasi yang lebih inklusif.

KERANGKA TEORI

Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya telah membuka ruang bagi individu, termasuk istri pejabat militer untuk memperkenalkan diri dan menampilkan kepribadian mereka ke publik (Pratama & Syahri, 2024). Dalam konteks ini, para istri yang identitas sebelumnya cenderung terbatas dalam lingkup tertutup organisasi atau keluarga kini dapat mengakses ruang publik digital. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai digital paradoks.

Pada satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi istri pejabat militer untuk melakukan *personal branding*, memamerkan hobi, minat, atau bisnis pribadi, tetapi di sisi lain, mereka tetap terikat pada aturan organisasi yang kaku yang mengharuskan mereka untuk selalu tampil sebagai representasi institusi suami mereka (Nadjamuddin, 2025).

Sebagai contoh, banyak istri pejabat militer yang aktif mengunggah konten kreatif di media sosial menggunakan seragam resmi organisasi, seperti Persit (Persatuan Istri Tentara) atau Pia Ardhya Garini. Mereka seringkali mengunggah video atau foto yang bersifat santai atau hiburan, seperti menari di TikTok dengan mengenakan seragam. Meskipun konten ini sering kali dimaksudkan untuk bersenang-senang atau menampilkan sisi lain dari kehidupan mereka, tetapi muncul teguran dari dalam organisasi karena dianggap menurunkan wibawa institusi militer. Dalam kasus ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi ruang ekspresi diri, tetapi juga menjadi "papan reklame" bagi pangkat dan jabatan suami. Praktik ini tidak hanya membatasi ekspresi diri, tetapi juga menciptakan ketegangan antara kebebasan digital dan kewajiban untuk menjaga citra organisasi (Andhika et al., 2025). Dalam konteks ini, pengawasan siber (*cyber-surveillance*) menjadi masalah baru bagi tubuh perempuan. Ini karena aktivitas digital istri pejabat militer seringkali dipantau secara internal. Jika seorang istri mengunggah hal-hal yang berhubungan dengan kemewahan atau kekayaan (dikenal dengan istilah *flexing*), sanksi sosial atau administratif akan diberikan, baik kepada istri maupun suami. Hal ini menunjukkan bahwa identitas digital perempuan dalam lingkungan militer tidak pernah sepenuhnya mandiri. Mereka selalu dilihat melalui lensa jabatan suami dan harus menjaga citra yang sejalan dengan

ekspektasi organisasi (Athallah et al., 2025).

Fenomena identitas yang tereduksi menjadi representasi suami dalam organisasi istri militer bukanlah kasus yang terisolasi. Hal ini juga terjadi dalam struktur organisasi istri instansi pemerintahan lainnya, seperti Bhayangkari (istri polisi) dan Dharma Wanita (istri pegawai negeri sipil/ASN). Dalam ketiga organisasi ini, terdapat pola yang dapat disebut sebagai *state-led feminism*, yaitu feminisme yang dikendalikan dan dibentuk oleh negara (Keohane, 2020).

Salah satu karakteristik utama dari organisasi istri-istri ini adalah posisi pemimpin dalam organisasi tersebut, misalnya ketua, secara otomatis dijabat oleh istri dari pimpinan tertinggi institusi, tanpa mempertimbangkan kompetensi pribadi sang istri dalam hal kepemimpinan (Nugroho & Ahmar, 2022). Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam banyak organisasi istri instansi pemerintah di Indonesia, perempuan lebih sering diposisikan sebagai pendamping suami, dan keberadaan mereka lebih didorong untuk mendukung karier suami daripada untuk mengembangkan diri secara mandiri.

Perempuan dalam Struktur Militer dan *State Ibuism*

Dalam konteks institusi militer di Indonesia, peran perempuan, khususnya sebagai istri prajurit, tidak dapat dilepaskan dari konstruksi ideologis yang dikenal sebagai *state ibuism*. Konsep ini diperkenalkan oleh Julia Suryakusuma, yang menjelaskan bagaimana negara mengonstruksi perempuan sebagai pendamping suami, pengelola rumah tangga, serta pendukung stabilitas sosial dan politik (Andhika et al., 2025). Dalam kerangka ini, identitas perempuan tidak dibangun sebagai individu otonom, melainkan sebagai ekstensi dari peran

suami dalam struktur negara (Nadjamuddin, 2025).

Dalam organisasi istri militer, seperti Persit atau organisasi sejenis, posisi perempuan secara struktural ditentukan oleh pangkat suami. Hal ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam institusi militer bersifat hierarkis dan patriarkal, di mana perempuan berfungsi sebagai representasi simbolik dari kekuasaan laki-laki. Dengan demikian, fungsi dan tugas perempuan dalam konteks ini lebih banyak diarahkan pada peran domestik, sosial, dan representasional dibandingkan dengan pengembangan identitas personal dan profesional.

Representasi dan Kontruksi Identitas

Konsep representasi menjadi penting untuk memahami bagaimana identitas perempuan dibentuk dalam wacana organisasi. Menurut Stuart Hall, representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial. Dalam konteks organisasi istri militer, penyebutan perempuan sebagai “Ibu Dandim” atau “Ibu Letkol” merupakan bentuk representasi yang mengonstruksi identitas perempuan sebagai turunan dari identitas suami (Andi & Sukri, 2022).

Representasi ini tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam banyak kasus, representasi perempuan dalam media, termasuk dalam bentuk visual seperti iklan atau konten media sosial, cenderung menampilkan perempuan sebagai simbol kesuksesan laki-laki, bukan sebagai subjek yang memiliki agensi sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas perempuan tidak hanya terjadi dalam interaksi organisasi, tetapi juga diperkuat melalui praktik representasi di media (Ilvani, 2019). Dalam konteks ini, meskipun terdapat perbedaan

antarorganisasi, pola struktural yang serupa menunjukkan bahwa organisasi-organisasi ini, termasuk Persit, Bhayangkari, dan Dharma Wanita, dibangun di atas prinsip dasar yang sama, yaitu Pancadarma Wanita, yang menempatkan perempuan sebagai pendamping suami dengan segala peran dan tanggung jawab yang melekat padanya (Elisabeth & Adim, 2022). Meskipun ada nuansa sipil dalam organisasi Bhayangkari atau Dharma Wanita, yang memungkinkan adanya fleksibilitas, tetapi dalam organisasi istri militer, struktur dan disiplin yang diterapkan sangat kaku dan militeristik. Pengaruh Orde Baru yang menekankan kontrol sosial terhadap perempuan melalui organisasi mereka masih terasa kuat dalam struktur ini, yang menjadikan organisasi istri militer sebagai alat untuk memastikan stabilitas institusi dari level keluarga. Peran perempuan dalam organisasi seperti Persit dan Bhayangkari sering kali dilihat hanya sebagai pendamping dan bukan sebagai individu yang memiliki keahlian atau peran mandiri (Oktapiyani & Hamdani, 2025; Purnama et al., 2025).

Media Sosial dan Disiplin Digital

Perkembangan media sosial menghadirkan ruang baru bagi perempuan untuk mengekspresikan identitas diri. Namun, dalam konteks organisasi militer, ruang ini tidak sepenuhnya bebas. Konsep pengawasan dan disiplin sosial dapat dijelaskan melalui pemikiran Michel Foucault tentang *panopticon*, di mana individu menginternalisasi pengawasan dan mengontrol perilakunya sendiri (Mills, 2003).

Dalam konteks digital, fenomena ini berkembang menjadi *digital surveillance*, di mana aktivitas perempuan di media sosial dipantau dan dinilai berdasarkan standar organisasi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga menjadi alat kontrol

yang memperkuat norma patriarkal. Perempuan diharapkan untuk menampilkan citra ideal sebagai istri pejabat militer, sehingga identitas digital mereka tetap terikat pada posisi suami (Hipdizah et al., 2025; Marzuki et al., 2025).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana wacana organisasi militer mengonstruksi identitas perempuan, kita dapat mengadopsi teori Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Sara Mills (Oktapiyani & Hamdani, 2025). Mills berfokus pada cara-cara wacana sosial menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan, melalui dua mekanisme utama: Posisi Subjek-Objek dan Posisi Penulis-Pembaca.

Posisi Subjek-Objek. Dalam banyak interaksi sosial dalam organisasi istri militer, penyebutan nama suami misalnya "Ibu Kolonel X" atau "Ibu Letnan Kolonel" secara langsung menunjukkan bahwa suami adalah Subjek, sementara istri adalah Objek yang hanya ada karena keberadaan suami. Nama perempuan, yang seharusnya menjadi identitas pribadi mereka, digantikan oleh gelar jabatan suami. Dengan demikian, istri tidak memiliki keberadaan mandiri dalam struktur sosial organisasi, ia hanya ada sebagai representasi dari keberadaan suami. Dalam analisis Mills, fenomena ini menunjukkan bagaimana perempuan dalam wacana ini kehilangan agensi mereka kemampuan untuk bertindak dan memilih secara mandiri.

Marginalisasi Identitas. Dalam praktik wacana organisasi istri militer, keberhasilan perempuan dalam menjalankan aktivitas sosial sering kali diatributkan sebagai dukungan terhadap karier suami, bukan sebagai pencapaian pribadi. Identitas perempuan sebagai istri prajurit terjaga melalui peran mereka dalam mendampingi suami, dan kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan selalu dilihat sebagai perpanjangan dari citra dan status suami mereka. Penelitian ini

menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Sara Mills, yang berfokus pada bagaimana wacana sosial membentuk dan mempertahankan posisi perempuan dalam struktur kekuasaan (Oktapiyani & Hamdani, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Penelitian menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Sara Mills untuk mengkaji konstruksi identitas perempuan dalam organisasi istri militer.

Subjek/Objek penelitian ini adalah praktik komunikasi dan representasi identitas perempuan dalam organisasi istri militer di Indonesia. Penelitian ini tidak secara spesifik menyebutkan nama organisasi secara eksplisit untuk menjaga etika penelitian dan anonimitas informan, mengingat sensitivitas struktur institusi militer. Oleh karena itu, penyebutan organisasi dilakukan secara umum sebagai “organisasi istri militer”, yang secara karakteristik merujuk pada organisasi yang memiliki struktur hierarkis berbasis pangkat suami (Hasanah, 2018).

Unit analisis penelitian ini adalah tuturan verbal dalam interaksi organisasi (misalnya, penyebutan nama dan jabatan suami); praktik komunikasi simbolik dalam kegiatan organisasi; representasi identitas perempuan dalam konten media sosial (Instagram, TikTok); dan narasi pengalaman informan terkait identitas diri dalam organisasi. Unit analisis ini dipilih untuk mengidentifikasi bagaimana wacana membentuk posisi subjek-objek perempuan dalam struktur organisasi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Wawancara dilakukan terhadap istri prajurit dari berbagai tingkat kepangkatan (misalnya, Serda, Kapten, Mayor, Letkol,

Kolonel). Pemilihan informan dilakukan berdasarkan satu kriteria, yakni aktif dalam organisasi istri militer. Memiliki pengalaman mengikuti kegiatan organisasi Bersedia menceritakan pengalaman personal (Sugiyono, 2018).

Observasi dilakukan terhadap interaksi dalam kegiatan organisasi (formal maupun informal). Praktik penyebutan nama dan jabatan ataupun pola komunikasi antaranggota. Observasi dilakukan dengan mencatat pola berulang (*pattern*) yang muncul dalam interaksi sosial.

Data wawancara dan observasi diperkaya dengan data dokumentasi dan analisis media sosial. Peneliti mengumpulkan data berupa postingan media sosial (Instagram, TikTok), *caption*, komentar, dan representasi visual.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model Analisis Wacana Kritis Sara Mills (2003) dengan menggunakan lima langkah.

Langkah pertama melakukan identifikasi teks dan praktik wacana. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bentuk-bentuk bahasa dan praktik komunikasi yang digunakan dalam organisasi, terutama dalam penyebutan identitas perempuan.

Langkah berikutnya adalah menganalisis posisi Subjek–Objek. Data dianalisis untuk melihat siapa yang menjadi subjek (pemilik kuasa) dan siapa yang menjadi objek dalam wacana. Dalam konteks ini, dilihat bagaimana perempuan diposisikan dalam relasi dengan suami.

Langkah ketiga adalah melakukan analisis fragmentasi identitas. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian identitas perempuan yang dihilangkan atau dipinggirkan, seperti profesi, nama pribadi, atau aspirasi individu.

Tahap keempat adalah melakukan analisis representasi dan makna. Data dari media sosial dianalisis untuk melihat bagaimana perempuan merepresentasikan

diri dan bagaimana representasi tersebut dikontrol oleh norma organisasi.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Hasil analisis kemudian ditafsirkan dalam kerangka relasi kuasa dan patriarki birokratik untuk memahami bagaimana identitas perempuan dikonstruksi dan dipertahankan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik: Triangulasi sumber (wawancara, observasi, media sosial), Triangulasi metode, Member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebutan Nama dan Jabatan sebagai Kekerasan Simbolik dan Praktik Ideologis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penyebutan perempuan berdasarkan nama dan jabatan suami, seperti “Ibu Dandim” atau “Ibu Letkol”, merupakan pola komunikasi yang dominan dalam interaksi organisasi. Wawancara mengungkapkan bahwa penggunaan sebutan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk penghapusan identitas personal perempuan.

Dalam perspektif [Bourdieu \(1991\)](#), praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik, yaitu mekanisme dominasi yang bekerja secara halus melalui bahasa dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Penggunaan nama jabatan suami menggantikan nama asli perempuan menunjukkan bahwa identitas perempuan direduksi menjadi representasi status laki-laki.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui pendekatan Sara Mills, praktik ini menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dalam wacana, sementara perempuan menjadi objek yang keberadaannya bergantung pada relasi

dengan suami. Perempuan tidak memiliki posisi sebagai agen yang mandiri dalam struktur bahasa yang digunakan ([Mills, 2003](#)).

Secara ideologis, praktik ini merefleksikan keberlanjutan ideologi patriarki birokratik, di mana struktur militer tidak hanya mengatur relasi formal, tetapi juga meresap ke dalam praktik bahasa sehari-hari. Bahasa menjadi alat reproduksi ideologi yang menormalisasi subordinasi perempuan, sehingga perempuan secara tidak sadar menginternalisasi posisi mereka sebagai “perpanjangan identitas suami”.

Fragmentasi Identitas Perempuan

Temuan berikutnya mengungkapkan fragmentasi identitas perempuan, di mana banyak keahlian atau pencapaian pribadi perempuan diabaikan dalam organisasi. Misalnya, seorang istri yang memiliki karier profesional yang sukses, seperti menjadi dokter atau pengusaha, sering kali harus mengutamakan peran mereka sebagai pendamping suami, bukan sebagai individu dengan karier atau prestasi pribadi. Keberadaan mereka dalam organisasi lebih banyak ditentukan oleh pangkat suami daripada kemampuan atau keahlian pribadi ([Hasanah, 2018](#)).

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam organisasi ini, pencapaian individu perempuan tidak dihargai, kecuali jika itu mendukung citra atau fungsi suami dalam struktur organisasi. Hal ini sesuai dengan pandangan [Purnamasari \(2024\)](#), tentang fragmentasi identitas, di mana elemen-elemen dari identitas perempuan diabaikan demi kepentingan sosial atau organisasi yang lebih besar.

Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Digital

Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram dan TikTok memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri mereka. Namun,

dalam konteks organisasi istri militer, muncul digital paradoks. Pada satu sisi, media sosial memungkinkan istri pejabat militer untuk melakukan *personal branding* dan menampilkan sisi lain dari kehidupan mereka, tetapi, pada sisi lain, mereka tetap diharuskan untuk menjaga citra suami mereka dalam organisasi.

Sebagai contoh, banyak istri pejabat militer yang aktif di media sosial, mengunggah gambar atau video yang menampilkan kehidupan pribadi mereka, seperti hobi atau kegiatan sosial. Namun, mereka sering kali dihadapkan pada aturan ketat yang memaksa mereka untuk menjaga citra suami dan organisasi. Hal ini menciptakan pengawasan digital (*cyber-surveillance*), di mana setiap unggahan yang tidak sesuai dengan harapan organisasi bisa berdampak buruk pada reputasi pribadi dan karier suami mereka.

Salah satu contohnya adalah ketika istri pejabat militer mengunggah konten dengan mengenakan seragam organisasi dalam video TikTok yang sifatnya hiburan. Meski tujuannya untuk bersenang-senang, tetapi sering kali menuai kritik internal karena dianggap dapat menurunkan wibawa institusi. Dengan demikian, perempuan tetap dibatasi oleh norma sosial yang mengharuskan mereka untuk mematuhi ekspektasi organisasi, baik di dunia nyata maupun dunia maya (Jakimow, 2018).

Penekanan pada Kepatuhan dalam Organisasi Istri Militer

Temuan berikutnya adalah penekanan pada kepatuhan dalam organisasi istri militer. Berbeda dengan organisasi istri instansi lain seperti Bhayangkari (istri Polri) atau Dharma Wanita (istri ASN), organisasi istri militer cenderung lebih ketat dalam hal disiplin dan aturan yang berlaku. Dalam struktur ini, perempuan lebih sering diposisikan sebagai pendamping suami, dan peran

mereka dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh pangkat suami mereka.

Kepatuhan pada aturan menjadi harga mati, dan banyak perempuan yang merasa tertekan untuk selalu mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bahkan, ketika mereka memiliki potensi atau keterampilan pribadi, mereka sering kali harus mengorbankannya demi memenuhi harapan dan peran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial, di mana perempuan tidak diberi kebebasan untuk berkembang di luar peran tradisional mereka sebagai pendamping suami.

Penggantian Nama sebagai Kekerasan Simbolik

Salah satu temuan yang paling menyolok dalam penelitian ini adalah penggantian nama asli perempuan dengan gelar suami, seperti “Ibu Dandim” atau “Ibu Letkol X”. Proses ini bukan sekadar perubahan dalam penyebutan nama, tetapi merupakan bentuk kekerasan simbolik yang menghapus identitas pribadi perempuan. Ketika perempuan hanya dikenal sebagai “Ibu” dari suami mereka, mereka kehilangan hak untuk dikenali sebagai individu dengan identitas mereka sendiri. Menurut teori Sara Mills (2008), kekerasan simbolik adalah cara untuk mempertahankan dominasi dalam wacana sosial, yang mengharuskan perempuan mengadopsi identitas yang lebih berkaitan dengan suami mereka daripada dengan diri mereka sendiri.

Fragmentasi Identitas dan Pengabaian Pencapaian Pribadi

Fragmentasi identitas perempuan dalam organisasi istri militer menunjukkan bahwa banyak keahlian dan pencapaian pribadi mereka terabaikan dalam proses pembentukan identitas sosial mereka. Keahlian atau pekerjaan

profesional yang dimiliki perempuan sering kali tidak dihargai, kecuali jika itu mendukung citra atau fungsi suami dalam organisasi. Dalam hal ini, perempuan tidak diberi ruang untuk mengembangkan potensi atau karier pribadi mereka, dan peran mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pangkat dan status suami mereka. Fenomena ini mencerminkan marginalisasi identitas perempuan dalam wacana sosial dan organisasi yang ada (Zulaikha & Firmonasari, 2023).

Pengaruh Media Sosial terhadap Identitas Perempuan

Media sosial memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri mereka, tetapi di dalam organisasi istri militer, kebebasan ini dibatasi oleh pengawasan dan kontrol sosial yang ketat. Pengawasan digital yang diterapkan oleh organisasi istri militer menunjukkan bagaimana perempuan harus selalu mematuhi norma sosial dan etika yang ada, bahkan di dunia maya (Prihantini et al., 2024; Tanjung et al., 2025). Setiap ekspresi yang tidak sesuai dengan ekspektasi organisasi dapat berdampak buruk bagi reputasi pribadi perempuan dan suami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial menawarkan kebebasan ekspresi, identitas perempuan tetap terikat pada peran dan citra suami mereka.

Kepatuhan sebagai Identitas Utama

Penekanan pada kepatuhan dalam organisasi istri militer menciptakan dinamika di mana perempuan diposisikan lebih sebagai pendamping suami daripada individu yang memiliki agensi atau hak untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kepatuhan pada aturan dan norma yang ada dalam organisasi ini membatasi kebebasan perempuan untuk mengembangkan identitas mereka sendiri. Mereka sering kali harus menyesuaikan diri dengan struktur yang sangat patriarkal dan kaku, yang hanya mengakui perempuan berdasarkan status dan peran mereka sebagai istri prajurit.

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana organisasi istri militer di Indonesia membentuk identitas perempuan dengan cara yang sangat terstruktur dan patriarkal. Sebagai mana yang di sebutkan dalam (Octavianti et al., 2025). Penyebutan nama dan jabatan suami, fragmentasi identitas, pengaruh media sosial, dan penekanan pada kepatuhan semuanya berfungsi untuk mengurangi perempuan menjadi objek pendamping suami. Identitas mereka dipengaruhi lebih oleh peran yang mereka miliki dalam mendampingi suami daripada oleh keahlian, prestasi, atau potensi pribadi mereka. Dalam konteks ini, organisasi istri militer memperkuat struktur kekuasaan yang ada, di mana perempuan tetap terperangkap dalam sistem yang mendominasi mereka.

Tabel 1

Perbandingan Kontras Identitas Asli (Individu) vs. Konstruksi Identitas Organisasi

Dimensi Identitas	Identitas Asli (Personal/Otonom)	Konstruksi Identitas Organisasi (Incorporated Wife)	Mekanisme Konstruksi (Perspektif Sara Mills)
Identitas Nama	Nama pemberian (misal: "Siti Aminah, S.E.")	Nama jabatan suami (misal: "Ibu Dandim" atau "Ibu Letkol X")	Nominalisasi & Objektifikasi: Nama diri hilang, digantikan oleh label jabatan yang menempatkan istri sebagai objek pendamping.
Status Profesional	Keahlian atau karier mandiri (misal: Dokter, Pengusaha)	Atribut pangkat suami; posisi di organisasi ditentukan oleh pangkat suami	Fragmentasi: Keahlian pribadi dianggap tidak relevan jika tidak mendukung citra suami.
Agensi & Otoritas	Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi.	Keputusan harus selaras dengan "Arahan Pimpinan" dan protokol militer.	Posisi Subjek-Objek: Istri berada dalam posisi "objek" yang menerima instruksi dari struktur hierarki.
Representasi Digital	Ekspresi diri bebas di media sosial (hobi, ide pribadi)	Kurasi konten yang berfokus pada citra suami atau organisasi	Pendisiplinan Tubuh: Tubuh perempuan dikonstruksi sebagai etalase martabat institusi.
Relasi Sosial	Pertemanan berdasarkan kesamaan minat	Hubungan yang diatur oleh "Senioritas" dan pangkat suami	Marginalisasi: Suami berpangkat rendah menghambat suara perempuan dalam struktur organisasi.

Sumber: Hasil olahan peneliti

Data yang terdapat dalam tabel 1 menunjukkan bagaimana identitas perempuan di ruang organisasi militer cenderung terfragmentasi dan kehilangan otonomi. Kutipan dari Informan A, yang merasa nama aslinya sudah "mati", mengonfirmasi teori Sara Mills tentang posisi subjek-objek. Di sini, identitas individu perempuan dihapus demi membangun identitas jabatan suaminya. Nama pemberian seperti "Siti Aminah" hilang digantikan dengan sebutan jabatan seperti "Ibu Danyon". Hal ini bukan sekadar penggantian label, tetapi

merupakan bentuk kontrol sosial yang menghapus agensi perempuan dalam ruang sosial (Suryakusuma, 2011).

Negasi Kompetensi Profesional

Kutipan dari Informan B mengilustrasikan negasi kompetensi profesional perempuan dalam organisasi militer. Meskipun dia memiliki gelar doktor, identitas profesinya diabaikan dan dianggap tidak relevan dalam konteks organisasi, yang lebih menonjolkan atribut pangkat suami. Hal ini memperkuat argumen mengenai *State Ibuism* yang

dipaparkan oleh (Hyunanda et al., 2021), yang menganggap bahwa status sosial perempuan dalam institusi militer sangat dipengaruhi oleh kedudukan suami mereka dalam struktur birokrasi negara. Dalam konteks ini, perempuan kehilangan

otonomi dalam membangun identitas profesional yang mandiri, karena seluruh perhatian dan penghargaan diberikan pada posisi suami dalam hirarki (Octavianti et al., 2025).

Tabel 2
Kontras Identitas Asli vs. Konstruksi Organisasi (Dengan Kutipan Informan)

Dimensi Identitas	Identitas Asli (Otonom)	Konstruksi Identitas Organisasi	Kutipan Informan (Data Lapangan)
Identitas Nama	Nama Pemberian (Birth Name)	Nama Jabatan Suami	"Kadang saya merasa nama asli saya sudah 'mati'. Di grup WhatsApp atau undangan, saya adalah 'Ibu Danyon'. Bahkan tetangga asrama pun panggil begitu." (Informan A, Istri Mayor)
Status Profesional	Karier Mandiri (e.g., Dosen, Dokter)	Atribut Pangkat Suami	"Saya ini Dokter Spesialis, tapi di pertemuan organisasi, saya tetap harus duduk di belakang istri atasan yang mungkin tidak bekerja. Gelar saya tidak laku di sini." (Informan B, Istri Kapten)
Agensi & Otoritas	Keputusan Pribadi	Kepatuhan Hierarkis	"Kami tidak bisa bilang 'tidak' kalau ada acara, meski ada urusan keluarga. Istri Komandan adalah komandan kami juga. Instruksinya harus jalan." (Informan C, Istri Serda)
Representasi Digital	Ekspresi Bebas di Medsos	Kurasi & Branding Institusi	"Mau posting foto liburan pakai baju santai saja mikir dua kali. Takut ada 'mata-mata' senior yang lapor ke suami kalau saya dianggap kurang bersahaja." (Informan D, Istri Letkol)
Relasi Sosial	Kedekatan Emosional	Strata Kepangkatan	"Susah punya teman curhat yang benar-benar tulus. Semuanya dibatasi pangkat suami. Kita bicara sangat hati-hati agar tidak jadi bahan gosip politik kantor." (Informan E, Istri Kolonel)

Sumber: Hasil olahan peneliti

Kepatuhan terhadap Hierarki dan Pengaruhnya terhadap Agensi

Perempuan yang berada dalam lingkungan organisasi militer juga menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap hierarki yang ada. Informan C menegaskan bahwa mereka tidak bisa menolak arahan dari istri atasan meskipun

memiliki kebutuhan pribadi (Octavianti et al., 2025). Ini menegaskan bahwa dalam struktur organisasi militer, perempuan ditempatkan dalam posisi "objek" yang harus mengikuti instruksi pimpinan. Posisi ini mencerminkan dominasi hierarki militer yang menghapuskan otonomi

individu perempuan dalam mengambil keputusan.

Pendisiplinan Tubuh dalam Representasi Digital

Kutipan dari Informan D pada tabel 2 menunjukkan bagaimana perempuan diorganisasi ini mengalami pendisiplinan tubuh dalam representasi digital mereka. Ketakutan akan pengawasan sosial (baik oleh senior atau oleh masyarakat) menyebabkan perempuan menghindari ekspresi bebas di media sosial. Mereka harus mengkurasi dan menyaring setiap konten yang dapat mencemarkan citra mereka atau suami mereka. Ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dikonstruksi sebagai "etalase" martabat institusi militer, di mana setiap perilaku di ruang publik akan mempengaruhi citra dan karier suami.

Marginalisasi dalam Relasi Sosial

Relasi sosial perempuan dalam organisasi militer juga sangat dibatasi oleh hierarki dan pangkat suami mereka. Informan E mencatat bahwa kesulitan dalam membangun hubungan tulus dengan teman-teman disebabkan oleh pembatasan yang diciptakan oleh strata kepangkatan. Setiap percakapan atau interaksi sosial harus dilakukan dengan hati-hati, karena mereka takut menjadi bahan gosip atau perbincangan dalam lingkungan organisasi yang sangat politis. Dalam hal ini, perempuan menjadi terisolasi dan seringkali harus menekan identitas pribadi mereka demi menjaga harmoni dalam organisasi (Oktapiyani & Hamdani, 2025; Sahri & Maella, 2025).

Jika ditelaah lebih dalam, seluruh praktik komunikasi dalam organisasi istri militer tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai sistem tanda yang merepresentasikan ideologi tertentu. Dalam perspektif representasi Stuart Hall, tanda seperti penyebutan "Ibu Dandim" bukan sekadar

label, melainkan simbol yang membawa makna ideologis tentang posisi perempuan sebagai subordinat dalam struktur kekuasaan laki-laki (Mills, 2003). Dengan demikian, praktik komunikasi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk naturalisasi ideologi patriarki, di mana dominasi laki-laki tidak lagi terlihat sebagai paksaan, melainkan sebagai norma yang diterima secara kolektif. Ideologi ini bekerja secara halus melalui bahasa, simbol, dan representasi visual, sehingga sulit untuk disadari maupun dilawan oleh individu di dalamnya (Fatmawati, 2020).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi identitas perempuan dalam organisasi istri militer tidak hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga merupakan praktik diskursif yang mereproduksi relasi kuasa secara sistematis. Dalam perspektif Sara Mills, bahasa tidak bersifat netral, melainkan menjadi medium yang menentukan posisi subjek dan objek dalam struktur sosial (Oktapiyani & Hamdani, 2025). Praktik penyebutan nama berdasarkan jabatan suami menunjukkan bagaimana perempuan secara konsisten diposisikan sebagai objek dalam wacana, sementara laki-laki tetap menjadi subjek utama (Mills, 2003).

Lebih lanjut, melalui kerangka Pierre Bourdieu, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dilegitimasi melalui kebiasaan dan norma organisasi. Perempuan tidak hanya mengalami subordinasi secara struktural, tetapi juga menginternalisasi posisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar (Fatmawati, 2020).

Dalam konteks digital, temuan ini memperluas analisis dengan menunjukkan bahwa mekanisme kontrol tidak lagi terbatas pada ruang fisik organisasi, tetapi juga merambah ruang virtual. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault tentang disiplin dan pengawasan, di mana individu mengontrol dirinya sendiri karena

adanya potensi pengawasan terus-menerus (Saputri & Pinem, 2022). Dengan demikian, identitas perempuan dalam organisasi istri militer dibentuk melalui kombinasi antara wacana, simbol, dan mekanisme kontrol sosial yang bersifat berlapis.

Di era digital, pengawasan terhadap perempuan dalam organisasi istri militer tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Bentuk pengawasan ini dapat dilihat dalam beberapa praktik konkret (Tanjung et al., 2025). Pertama, pemantauan konten oleh senior atau struktur organisasi. Unggahan yang dianggap tidak sesuai (misalnya: menampilkan gaya hidup mewah, pakaian tidak formal, atau konten hiburan dengan seragam) dapat memicu teguran informal hingga formal. Kedua, sanksi sosial dan institusional. Konten yang dianggap “tidak mencerminkan citra institusi” tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga dapat mempengaruhi penilaian terhadap karier suami. Ketiga, *self-censorship* (sensor diri). Perempuan secara sadar membatasi ekspresi diri mereka di media sosial karena adanya kekhawatiran akan pengawasan, baik dari sesama anggota maupun pimpinan organisasi. Keempat, standarisasi representasi digital. Perempuan didorong untuk menampilkan citra tertentu, seperti kesederhanaan, kesopanan, dan loyalitas terhadap institusi, sehingga identitas digital menjadi seragam dan terkontrol.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang disiplin baru yang memperluas kontrol institusi terhadap tubuh dan identitas perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyebutan nama dan jabatan suami dalam organisasi istri militer secara sistematis membentuk konstruksi identitas perempuan yang tereduksi dan

subordinatif. Perempuan ditempatkan sebagai representasi jabatan suami, bukan sebagai individu dengan identitas, agensi, dan kompetensi personal. Melalui perspektif Analisis Wacana Kritis Sara Mills, praktik tersebut berfungsi sebagai kekerasan simbolik yang menghapus nama diri perempuan, menegaskan pencapaian profesional, serta menempatkan perempuan dalam posisi objek dalam struktur wacana organisasi. Fragmentasi identitas ini diperkuat oleh struktur hierarki militer yang kaku dan patriarkal, di mana kepatuhan menjadi identitas utama yang harus dijalankan oleh istri

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah strategis untuk mengurangi praktik subordinasi identitas perempuan dalam organisasi istri militer. Pertama, organisasi perlu mereformulasi praktik komunikasi formal dengan mengedepankan penggunaan nama personal perempuan sebagai bentuk pengakuan identitas individu. Kedua, diperlukan penyusunan pedoman internal yang lebih sensitif gender, khususnya dalam mengatur aktivitas perempuan di media sosial, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kontrol, tetapi juga memberikan ruang ekspresi yang adil. Ketiga, organisasi dapat mengembangkan program pemberdayaan yang berbasis kompetensi, di mana identitas perempuan tidak hanya dikaitkan dengan jabatan suami, tetapi juga dengan keahlian dan kapasitas profesional yang dimiliki. Keempat, diperlukan upaya reflektif di tingkat institusi untuk meninjau kembali praktik-praktik simbolik yang selama ini dianggap wajar, tetapi berpotensi mereproduksi ketimpangan gender secara sistematis.

Penelitian ini juga menyarankan pentingnya refleksi kritis dari institusi terkait terhadap praktik komunikasi dan struktur organisasi yang berpotensi menegaskan identitas perempuan. Organisasi istri militer perlu membuka

ruang yang lebih adil bagi pengakuan identitas personal, kompetensi profesional, dan agensi perempuan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan jabatan suami. Selain itu, diperlukan kebijakan internal yang lebih sensitif gender dalam merespons aktivitas perempuan di ruang digital agar media sosial tidak semata menjadi alat kontrol, melainkan ruang ekspresi yang setara.

Hasil temuan penelitian masih memiliki kekurangan dan ruang yang bisa diteliti oleh peneliti lainnya di masa mendatang, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan organisasi istri militer dengan organisasi istri instansi negara lainnya untuk memperdalam pemahaman mengenai pola patriarki birokratik dan variasi praktik konstruksi identitas perempuan di Indonesia.

REFERENSI

- Andhika, A. M. N., Muharudin, E., Sukirno, S., & Suroso, E. (2025). Kajian wacana kritis Teun A. Van Dijk pada akun Instagram@komikfaktap periode 2024. *Ruang Kata*.
<https://jurnal.umnu.ac.id/index.php/jrk/article/view/1989>
- Andi, A., & Sukri, A. (2022). Strategi komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif 2019 di Pekanbaru. *Journal of Political Communication and Media Juni*, 1(1). <https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/21>
- Athallah, R. E., Khairunnisa, A., & Safitri, D. (2025). Tagar sebagai praktik perlawanan digital warga: Strategi diskursif dalam# TolakRUUTNI di media sosial. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
<https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.46463>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson (ed.)). Polity Press.
- Dilley, W. C. (2009). Globalization and cultural identity in the films of Ang Lee. In *Style* (Vol. 43, Issue 1).
- Elisabeth, R., & Adim, A. K. (2022). Representasi humor seksis pada program *Tonight Show* di NET . TV. *E-Proceeding of Management*, 9(2).
<https://repositori.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/178261/slug/representasi-humor-seksis-pada-program-tonight-show-di-net-tv.html>
- Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan konsep dasar kekerasan simbolik. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*.
<https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.3280>
- Hasanah, R. U. (2018). *Perempuan melawan isu perempuan (Studi analisis wacana Sara Mills film Pertaruhan At Stake 2008)*. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<https://doi.org/1113051000024>
- Hipdizah, S. A., Purwanto, S. I. P. S., & ... (2025). *Buku ajar doktrin militer*. books.google.com.

- Hyunanda, V. F., Palacios Ramírez, J., López-Martínez, G., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). State ibuism and women's empowerment in Indonesia: Governmentality and political subjectification of Chinese Benteng women. *Sustainability*, 13(6), 3559. <https://doi.org/10.3390/su13063559>
- Ilvani F. V. W. (2019). Studi semiotika representasi identitas selebgram perempuan bercadar dalam media sosial Instagram. *Interaksi Online*, 7(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24145>
- Ives, G., & Rana, R. (2018). *Language and power*. books.google.com.
- Jakimow, T. (2018). Beyond "state ibuism": Empowerment effects in state-led development in Indonesia. *Development and Change*. <https://doi.org/10.1111/dech.12374>
- Jon, I. (2020). Reframing postmodern planning with feminist social theory: Toward "anti-essentialist norms." *Planning Theory*, 19(2). <https://doi.org/10.1177/1473095219851214>
- Keohane, N. O. (2020). Women, power & leadership. *Daedalus*, 149(1). https://doi.org/10.1162/DAED_a_01785
- Kim, K., & Angouri, J. (2023). "It's hard for them to even understand what we are saying" (.) Language and power in the multinational workplace. *Critical Perspectives on International Business*. <https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2020-0084>
- Lewis, W. W. (2020). *The mediated construction of reality: by Nick Couldry and Andreas Hepp*, Cambridge, Polity Press. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/14794713.2020.1730071>
- Marzuki, M., Kamila, N. P., & Berutu, L. A. K. (2025). Aktor dan media dalam komunikasi politik. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/2123>
- Mills, S. (2003). Gender and politeness. In *Gender and Politeness*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511615238>
- Mills, S. (2008). *Language and sexism*. Cambridge University Press
- Nadjamuddin, R. S. (2025). *Analisis konten media sosial pada akun calon presiden pemilu 2024 dalam meningkatkan personal branding*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56466>
- Nugroho, G. W., & Ahmar, N. (2022). Whistleblowing system, gaya kepemimpinan, digitalisasi, budaya organisasi dan fungsi audit internal terhadap perencanaan strategis. In *Behavioral Accounting Journal*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/nv7yokvuvbev5kwyuxkmtl3iue/access/wayback/http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/download/162/87>
- Octavianti, A., Purwanto, E., Hidayati, A., Sari, H. J., & Rachman, Z. (2025). Teori feminis dalam dekonstruksi representasi perempuan di media sosial. In *CONVERSE Journal Communication Science*. <https://doi.org/10.47134/converse.v2i1.4395>

- Oktapiyani, D., & Hamdani, A. (2025). Model analisis wacana kritis Sara Mills dalam menganalisis representasi gender di media sosial: Studi kasus pada narasi feminisme dalam konten digital 2024. *Jurnal Membaca Bahasa Dan Sastra Indonesia*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurnalmembaca/article/view/30297>
- Pratama, R. A., & Syahri, A. S. (2024). Pemanfaatan Instagram sebagai media promosi buku Amazing Iqra Balita pada akun@ Iqrabalita.official. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*. <http://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/1644>
- Prihantini, A. F., Nurhidayah, S., & Efendi, T. A. (2024). Konstruksi dan representasi citra perempuan dalam media visual periklanan Indonesia: Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Basataka*. <https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/489>
- Purnama, D., Wahdayanti, S., & Awaru, A. O. T. (2025). Media sosial dan citra perempuan lokal: Analisis representasi gender dalam promosi wisata Bira. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*. <http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/9658>
- Purnamasari, M. (2024). The gender ideology of state ibuiism and women's roles in care practices at the Rawa Panjang Waste Bank, Bojonggede, Bogor. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol29/iss2/2/>
- Rachmawati, S. A., Retnaningdyah, P., & Setiawan, S. (2022). Critical discourse analysis of language and power in EFL classroom interaction. *Journal of English Teaching*. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1355709>
- Sahri, S. N., & Maella, N. A. S. (2025). Representasi feminisme digital di media sosial: analisis konten edukasi gender pada akun Instagram@ kawanpuan. id. In *Medium*. journal.uir.ac.id. <https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/25492/8909>
- Saputri, M. I. M., & Pinem, M. L. (2022). The glorification of beauty on social media: a case study of the exploitation of female students on the Instagram account @ugm.cantik. *Journal of Social Development Studies*, 3(1), 70–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsds.4446>
- Sugiyono. (2018). *Metode peneiltian kuantitatif, kualitatif kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). In *Bandung: Alfabeta*.
- Suryakusuma, J. I. (2011). *State ibuiism: The social construction of womanhood in the Indonesian new order*. Komunitas Bambu.
- Svensson, G. (2019). *Book review: The mediated construction of reality*. journals.sagepub.com. <https://doi.org/10.1177/0163443717737614>

- Tanjung, R. T., Lubis, M. R., & Hasibuan, S. (2025). Kritik feminis terhadap representasi gender dalam media. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/8011>
- Turner, M., & Lin, A. M. Y. (2024). Translanguaging: Process and power in education. *Linguistics and Education*. Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898589824000731>
- Yusanto, F., Hidayat, D. R., Irawan, R. E., & Piliang, Y. A. (2020). Critical discourse analysis of marginalization of local wisdom content in television documentary program. *Proceedings of the 2nd Jogjakarta Communication Conference (JCC 2020)*.
<https://www.atlantispress.com/proceedings/jcc-20/125943449>
- Zembylas, M. (2020). Emotional capital and education: Theoretical insights from Bourdieu. *Bourdieu and Education*.
<https://doi.org/10.4324/9780429445163-4>
- Zulaikha, S., & Firmonasari, A. (2023). Wacana stigmatisasi perempuan berpendidikan tinggi yang terefleksikan melalui media sosial YouTube. *MIMESIS*, 4(2), 191–201.
<https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8623>